

PROSPEK PEKERJAAN NELAYAN DI ERA OTONOMI DAERAH : STUDI DESKRIPTIF DI KAWASAN PESISIR PANTAI MALANG SELATAN

Budhy Prianto*

Abstraksi : Digulirkannya otonomi daerah telah membawa pengaruh positif dan negatif dalam hampir semua aspek kehidupan di daerah. Fenomena ini juga dapat ditemukan dalam komunitas nelayan. Persoalan batas laut dan persoalan yang terkait dengan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD menjadi "*necessary condition*" bagi mengemukanya diskursus tentang kehidupan nelayan. Penelitian ini mengambil sampel di Malang Selatan, yaitu Desa Tambakrejo dan Desa Pujiharjo. Temuan penelitian menyangkut sepuluh persoalan penting yang dihadapi nelayan : 1) Komunitas nelayan dapat dipilah menjadi dua, yaitu nelayan pemilik kapal dengan nelayan ABK; 2) Faktor usia sangat menentukan bagi nelayan ABK; 3) Tingkat pendidikan nelayan rendah; 4) Kesenjangan penghasilan antara musim panen ikan dengan masa paceklik; 5) Pola hidup hedonisme; 6) Kesenjangan ekonomi dan sosial antara nelayan pemilik kapal dengan ABK; 7) Status tanah pemukiman yang belum jelas; 8) Tingkat ketergantungan nelayan pemilik kapal terhadap pekerjaan nelayan; 9) Keterampilan lain yang dimiliki sebagian ABK; 10) Pemahaman nelayan tentang otonomi daerah. Di era otonomi daerah prospek kehidupan nelayan sangat tergantung pada kebijakan Pemerintah Kabupaten. Jika paradigma *community based* yang digunakan, maka prospek pekerjaan nelayan akan lebih baik, tetapi jika paradigma *capital* atau *technological based* yang digunakan, maka akan terjadi sebaliknya.

Kata kunci : nelayan, pemilik kapal, ABK, prospek, otonomi daerah

Pendahuluan

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian lebih dikenal

* Dosen tetap Fisip Unmer Malang dan Kapuslit. Nakerdes Lembaga Penelitian Universitas Merdeka Malang

dengan Undang-undang Otonomi Daerah, maka kehidupan nelayan dengan segala persoalannya tidak luput dari dampak yang ditimbulkannya. Adapun dampak tersebut menyangkut tiga hal, antara lain : *Pertama*, yang pertama kali mencuat di kalangan nelayan adalah persoalan batas laut bagi daerah-daerah yang memiliki wilayah laut. *Kedua*, pemerintah daerah lebih disibukkan dengan penataan struktur pemerintahan dan upaya mencari sumber-sumber guna mendongkrak PAD, maka persoalan nelayan yang selama ini kurang diperhatikan oleh pemerintah daerah, menjadi benar-benar terabaikan. *Ketiga*, Di era otonomi daerah, yang seringkali dimaknai dengan adanya keharusan untuk mengkatrol setinggi-tingginya pendapatan daerah. Sehingga muncul kekhawatiran khususnya dikalangan nelayan, bahwa nantinya pemerintah daerah untuk meningkatkan retribusi dan pendapatan lain khususnya dari sektor perikanan, akan memberikan peluang yang lebih besar kepada nelayan-nelayan (pengusaha kapal) dengan peralatan yang lebih modern untuk mengeksploitasi sumberdaya laut besar-besaran, yang akibatnya tentu nelayan-nelayan kecil yang notabene menggunakan peralatan relatif tradisional akan terpinggirkan dengan sendirinya.

Berdasarkan latar belakang fenomena di atas, penelitian berjudul "Prospek Pekerjaan Nelayan Di Era Otonomi Daerah : Studi Deskriptif Di kawasan pantai Malang Selatan" ini bertujuan selain berusaha mengidentifikasi persoalan-persoalan penting yang dihadapi oleh para nelayan di kawasan Malang Selatan, juga berusaha untuk memprediksi prospek pekerjaan nelayan di era otonomi daerah. Adapun kontribusi dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan suatu *driving force* dilakukannya kajian lanjutan atas persoalan-persoalan yang dihadapi nelayan dan prospek pekerjaan nelayan. Selanjutnya dari sini diharapkan dapat disusun konsep atau pun kebijakan-kebijakan, serta langkah-langkah kongkrit yang bersifat antisipatif dan solutif yang mengarah kepada perbaikan kehidupan nelayan sebagai salah satu aset daerah yang penting.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian survey yang bersifat deskriptif. Obyek penelitian adalah para nelayan tradisional baik pemilik kapal maupun anak buah kapal (ABK), yang keseluruhannya

berjumlah 1.692 nelayan. Mereka tersebar di 6 kecamatan, yaitu Donomulyo, Bantur, Gedangan, Sumbermanjingwetan, Tirtoyudo, dan Ampelgading. Atas pertimbangan lokasi, waktu, biaya, dan besarnya komunitas nelayan, penelitian ini menentukan dua lokasi perkampungan nelayan sebagai sampel penelitian, yaitu Desa Tambakrejo di Kecamatan Sumbermanjing-wetan dan Desa Pujiharjo di Kecamatan Tirtoyudo. Untuk Desa Tambakrejo dengan jumlah nelayan 1.483 orang diambil sampel 70 nelayan ABK dan 15 nelayan pemilik kapal, dan untuk Desa Pujiharjo, dengan jumlah nelayan 120 orang, diambil sampel 10 nelayan pemilik kapal dan 20 nelayan ABK. Mengingat waktu luang nelayan agak sulit dipastikan, maka sampel dipilih secara purposif. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan prosentase frekwensi.

Analisis dan Interpretasi Data

Identitas Responden

Secara umum berdasarkan data yang dikumpulkan dari aspek umur terdapat perbedaan antara nelayan pemilik kapal dan nelayan anak buah kapal (ABK). Bagi seorang nelayan ABK dapat memulai pekerjaannya pada usia yang relatif masih muda, bahkan cenderung usia anak-anak. Ini ditunjukkan oleh kenyataan terdapat 6,6 % responden ABK yang berusia kurang dari 18 tahun, dan itu pun diantara mereka ada yang sudah menggeluti pekerjaannya selama 3-4 tahun. Sedangkan bagi nelayan pemilik kapal tidak ada data yang menunjukkan diantara mereka ada yang berusia kurang dari 18 tahun. Sementara, yang lain dapat dijumpai fakta terdapat 2,2 % nelayan ABK yang berusia lebih 60 tahun, sedangkan untuk nelayan pemilik kapal terdapat 24 % yang berusia lebih 60 tahun. Terdapat fakta juga yang menunjukkan 75,6 % nelayan ABK berusia antara 18-40 tahun. Hal demikian menunjukkan bahwa karakteristik pekerjaan nelayan ABK membutuhkan orang-orang yang benar-benar secara fisik kuat. Hal itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang datang dari kalangan usia muda (usia produktif). Sedangkan bagi nelayan pemilik kapal tidak terlalu membutuhkan tenaga fisik, tetapi kemampuan manajerial dan modal, sehingga sampai usia tua pun masih mampu menggeluti pekerjaannya. Karena pekerjaan sebagai ABK banyak digeluti oleh kalangan berusia muda, maka wajar bila ditemukan fakta, bahwa 38,9

% nelayan ABK berstatus belum menikah. Sementara untuk nelayan pemilik kapal hampir seluruhnya (96 %) sudah berstatus menikah, dan hanya terdapat 4 % yang berstatus janda.

Tingkat Pendidikan Nelayan

Sebagaimana data secara nasional, di pesisir pantai Malang Selatan juga menunjukkan data sangat rendahnya tingkat pendidikan nelayan. Pada tabel 1 di bawah dapat dilihat bahwa di kalangan nelayan pemilik kapal saja sebanyak 12 % tidak pernah sekolah, 40 % hanya tamat SD, 16 % tidak tamat SD, 16 % lainnya tamat SLTP, 12 % tamat SLTA, dan terdapat 4 % yang pernah mengenyam pendidikan tinggi meskipun tidak tamat. Sedangkan di kalangan nelayan ABK terdapat 5,6 % yang tidak pernah sekolah, 50 % hanya tamat SD, 14,4 % tidak tamat SD, 17,8 % tamat SLTP, 6,7 % tidak sempat menamatkan SLTP, 3,3 % sempat menamatkan SLTA, dan terdapat pula 2,2 % yang tidak sempat menamatkan SLTA.

Tabel 1
Tingkat Pendidikan Nelayan

Pendidikan Nelayan		Pemilik Kapal		ABK	
		Frek.	%	Frek.	%
Tidak Sekolah		3	12	5	5,6
SD	Tamat	10	40	45	50
	Tidak tamat	4	16	13	14,4
SLT P	Tamat	4	16	16	17,8
	Tidak tamat	-	-	6	6,7
SLT A	Tamat	3	12	3	3,3
	Tidak tamat	-	-	2	2,2
PT	Tamat	-	-	-	-
	Tidak tamat	1	4	-	-
J u m l a h		25	100	90	100

Sumber : data primer

Pendapatan Nelayan

Apabila dipandang dari segi penghasilan untuk sekali melaut dan sistem pengupahan yang berlaku, sebenarnya penghasilan nelayan dapat dikatakan tinggi dan sudah memenuhi rasa keadilan. Pada

musim panen ikan pendapatan nelayan ABK berkisar antara Rp. 30.000,00 sampai Rp. 300.000,00, dan pendapatan nelayan pemilik kapal berkisar antara Rp. 250.000,00 sampai Rp. 2.000.000,00 untuk sekali melaut. Penghasilan terendah diperoleh jika hasil tangkapan pada tataran minimal dan penghasilan tertinggi diperoleh jika hasil tangkapan mencapai tataran maksimal. Data penghasilan nelayan untuk sekali melaut selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2 berikut. Sistem pengupahan yang berlaku dapat dijelaskan sebagai berikut. Hasil keseluruhan tangkapan ikan mula-mula dikurangi 10 % untuk biaya makan, minum dan rokok selama melaut. Kemudian sisanya yang 90 % dibagi 2, yaitu 45 % untuk pemilik kapal (seluruh biaya operasional ditanggung pemilik kapal) dan 45 % untuk seluruh ABK. Pembagian untuk ABK didasarkan pada tugas setiap ABK di kapal. Nakhoda mendapatkan 2 bagian, pembuang jaring 1 ½ bagian, pembuang batu mendapatkan 1 ¼ bagian, pembuang saluran 1 ½ bagian, dan perawat perahu mendapat 2 bagian, dan ABK lainnya mendapatkan masing-masing 1 bagian. Khusus untuk nakhoda, seringkali masih mendapatkan lagi tambahan dari pemilik kapal, yang besarnya sangat ditentukan oleh besarnya hasil tangkapan dan tingkat hubungan antara nakhoda dan pemilik kapal.

Tabel 2
Penghasilan Nelayan Untuk Sekali Melaut di Musim Panen Ikan

Nelayan Pemilik Kapal			Nelayan ABK		
Penghasilan	F	%	Penghasilan	F	%
< 500.000	8	32	< 50.000	15	16,7
500.000-1.000.000	10	40	50.000-100.000	19	21,1
1.001.000-2.000.000	6	24	101.000-200.000	15	16,7
> 2.000.000	1	4	> 200.000	41	45,5
J u m l a h	25	100	J u m l a h	90	100

Sumber : Data primer

Pengaruh Musim

Hanya saja, penghasilan seperti itu tidak dapat dinikmati sepanjang tahun, karena adanya kendala musim. Dalam kehidupan nelayan dikenal adanya musim panen dan musim paceklik ikan. Musim panen ikan biasanya terjadi selama lebih kurang 7 bulan, mulai

sekitar April sampai dengan sekitar Oktober. Sedangkan bulan-bulan selebihnya merupakan musim paceklik ikan. Di luar musim paceklik masih dapat dijumpai lagi saat-saat nelayan tidak pergi melaut, yaitu saat bulan purnama, dan saat terjadi kerusakan mendadak pada kapal, mesin, atau alat tangkap. Maka yang terjadi adalah terdapatnya kesenjangan penghasilan yang sangat ekstrim antara pada musim panen ikan dengan musim paceklik dan saat-saat lain ketika nelayan tidak pergi (istirahat) melaut. Pada musim panen pendapatan tinggi (bahkan dapat melimpah), sebaliknya pada musim paceklik dan pada saat istirahat melaut nelayan tidak berpendapatan sama sekali.

"Budaya" Negatif Dalam Komunitas Nelayan

Penghasilan yang melimpah pada musim panen ikan itu, kemudian diketahui memunculkan suatu fenomena perilaku negatif yang membudaya, utamanya di kalangan nelayan ABK. Ketika musim panen ikan, karena memiliki banyak uang, nelayan cenderung hidup berfoya-foya. Minuman keras dan perjudian dapat dikatakan merupakan bagian dari kehidupan nelayan sehari-hari. Namun sebaliknya yang terjadi di musim paceklik. Lazim terjadi nelayan akan menjual apa saja barang yang dimiliki (yang mereka beli di saat panen ikan) untuk dapat menutup dan mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Fenomena ini menunjukkan, bahwa nelayan ABK tidak terlalu peduli dengan manajemen (keuangan) keluarga.

Kesenjangan Antara Nelayan Pemilik Kapal dengan Nelayan ABK

Meskipun di atas dikatakan, bahwa sistem pengupahan yang berlaku dianggap sudah memenuhi rasa keadilan, tetapi karena pola hidup yang kurang tertata dan kurang terarah di sebagian besar nelayan ABK, maka tampak adanya kesenjangan ekonomi diantara nelayan pemilik kapal dan nelayan ABK. Kesenjangan itu paling tidak dapat dilihat dari pertama, kepemilikan harta benda : tanah, rumah, kendaraan, barang elektronik. Kedua, beban keluarga dan biaya pengeluaran keluarga per bulan pada keluarga nelayan ABK tampak lebih berat dibanding pada keluarga nelayan pemilik kapal.

Mengenai status kepemilikan tanah, sampai saat penelitian ini dilakukan masih belum ada kepastian. Di pemukiman nelayan desa Pujiharjo nelayan hanya memegang semacam surat keterangan hak pakai yang dikeluarkan oleh Camat Tirtoyudo. Sedangkan di

pemukiman nelayan Sendangbiru desa Tambakrejo nelayan justru memegang formulir (yang di dalamnya sudah tercantum nama masing-masing penghuni) surat pernyataan kesanggupan membeli kapling yang ditempati kepada pihak swasta, yaitu PT Arum Permai Barat. Padahal demi kepastian masa depan nelayan membutuhkan segera diperolehnya sertifikat hak milik atas kapling yang saat ini digunakan sebagai tempat bermukim.

Ketergantungan Pada Pekerjaan Nelayan

Ketergantungan nelayan pemilik kapal pada pekerjaan nelayan sangatlah tinggi. Ini ditunjukkan oleh fakta, bahwa seluruh responden pemilik kapal menyatakan tidak ada niatan untuk suatu saat meninggalkan pekerjaan nelayan. Alasan terbesar (oleh 56 % responden) yang dikemukakan ialah, bahwa hasil dari usaha pemilikan kapal sudah lebih dari cukup untuk menghidupi keluarga secara layak. Sementara di kalangan ABK tingkat ketergantungan itu lebih rendah, yang ditunjukkan oleh fakta terdapatnya 48,9 % responden nelayan ABK yang memiliki niat untuk suatu saat meninggalkan pekerjaan nelayan. Alasan yang digunakan sangat beragam, diantaranya adalah, bahwa pekerjaan sebagai ABK beresiko tinggi, penghasilan ABK kurang mencukupi, pekerjaan ABK hanya sebagai batu loncatan, ingin merubah nasib, ingin berwiraswasta, dan karena faktor usia. Dalam hubungan ini ditemukan juga fenomena yang tampaknya memerlukan perhatian. Bahwa sebagian diantara nelayan pemilik kapal dan nelayan ABK memiliki pekerjaan lain di luar pekerjaan sebagai nelayan. Pekerjaan lain tersebut menjadikan tingkat kehidupan keluarga mereka lebih baik dari nelayan-nelayan lainnya. Fenomena lain yang dijumpai juga adalah, khusus di kalangan responden ABK. Bahwa terdapat sebagian nelayan ABK yang sebenarnya memiliki suatu ketrampilan, tetapi karena kendala-kendala tertentu, ketrampilan itu tidak dapat dimanfaatkan sebagai suatu usaha atau pekerjaan sampingan. Kendala-kendala itu diantaranya mencakup : kendala modal, kendala pemasaran, dan terdapat juga beberapa responden yang sudah mencoba berusaha tetapi tidak berhasil. Dengan demikian kiranya kendala-kendala itu dapat diatasi, ketrampilan itu dapat dimanfaatkan sebagai usaha atau pekerjaan sampingan, yang pada gilirannya akan dapat untuk menambah pendapatan keluarga. Kesenjangan pendapatan di musim paceklik juga akan dapat

dikurangi, sehingga kerawanan sosial yang seringkali terjadi di musim paceklik juga dapat ditekan.

Otonomi Daerah

Fakta yang ditemukan di lokasi penelitian adalah, bahwa sebagian besar responden nelayan pemilik kapal maupun nelayan ABK (lebih 70 %) tidak memahami otonomi daerah, konsekwensi, dan implikasinya pada kawasan yang menjadi tempat sekaligus sumber penghidupan mereka. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3
Pemahaman Nelayan Tentang Otonomi Daerah

Tingkat Pemahaman	Nelayan Pemilik Kapal		Nelayan ABK	
	F	%	F	%
Sangat Tidak Memahami	11	44	42	46,7
Tidak memahami	10	40	33	36,6
Memahami	4	16	8	8,9
Sangat memahami	-	-	-	-
Tidak menjawab	-	-	7	7,8
Jumlah	25	100	90	100

Sumber : Data primer

Data selanjutnya menunjukkan bahwa nelayan juga ternyata tidak banyak mengetahui tentang perkembangan yang terjadi maupun informasi yang berkaitan dengan lingkungan sekitarnya. Ini dapat dicermati dari jawaban responden atas beberapa pertanyaan penelitian. Atas pertanyaan tentang pengetahuan responden mengenai ada atau tidaknya kebijakan baru yang berkaitan dengan masalah perikanan dan kelautan, yang notabene berkaitan erat dengan kehidupan nelayan, 64% responden nelayan pemilik kapal dan 11,1% nelayan ABK menjawab tidak tahu. Sementara terdapat 20% responden nelayan pemilik kapal dan 80% nelayan ABK tidak memberikan jawaban. Data selengkapnya dapat diperiksa pada Tabel 4 di bawah.

Tabel 4

Pengetahuan nelayan tentang ada atau tidaknya kebijakan baru tentang hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan nelayan.

Keterangan	Nelayan Pemilik Kapal		Nelayan ABK	
	F	%	F	%
Ada perubahan kebijakan	4	16	5	5,6
Tidak ada perubahan	-	-	3	3,3
Tidak tahu	16	64	10	11,1
Tidak menjawab	5	20	72	80
J u m l a h	25	100	90	100

Sumber : Data Primer

Demikian juga dengan jawaban atas pertanyaan tentang pengetahuan responden mengenai ada atau tidaknya rencana penanaman modal/investasi di lokasi penelitian. Tabel 5 di bawah menunjukkan data-data itu. Sebanyak 16 % responden nelayan pemilik kapal dan 13,3 % responden nelayan ABK menyatakan ada, dan hanya 8,9 % responden nelayan ABK yang menjawab ada. Sementara 52 % responden nelayan pemilik kapal dan 6,7 % responden nelayan ABK menjawab tidak tahu, dan terdapat 32 % responden nelayan pemilik kapal dan 71,1 % responden nelayan ABK yang tidak memberikan jawaban.

Tabel 5

Pengetahuan nelayan tentang ada tidaknya rencana penanaman modal/investasi di lokasi penelitian.

Keterangan	Nelayan Pemilik Kapal		Nelayan ABK	
	F	%	F	%
Ada	4	16	12	13,3
Tidak ada	-	-	8	8,9
Tidak tahu	13	52	6	6,7
Tidak menjawab	8	32	64	71,1
J u m l a h	25	100	90	100

Sumber : Data Primer

Boleh jadi ini disebabkan nelayan terlalu sibuk mengurus pekerjaannya. Tetapi kelihatannya yang lebih penting ialah fenomena ini menunjukkan bahwa nelayan belum banyak tersentuh oleh

informasi-informasi pembangunan secara umum, maupun informasi pembangunan yang menyangkut kehidupan mereka sekali pun.

Kesimpulan

Adapun hasil dari penelitian yang selama ini dilakukan, telah menemukan beberapa fenomena yang bisa dijadikan acuan oleh pemerintah daerah untuk menciptakan suatu prospek pekerjaan nelayan yang lebih menjanjikan, khususnya di era otonomi daerah. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa komunitas nelayan di kawasan pesisir Malang Selatan dapat dipilah ke dalam dua kelompok besar, yaitu nelayan pemilik kapal dan nelayan anak buah kapal (ABK). Berdasarkan pemilahan ini kemudian dapat diidentifikasi 10 (sepuluh) perscalan penting yang terdapat dan dihadapi oleh komunitas nelayan. (1) bahwa bagi ABK faktor usia menjadi persoalan penting, mengingat ABK dominan dengan kerja fisik. Sementara untuk pemilik kapal faktor usia tidak menjadi persoalan. (2) secara umum tingkat pendidikan nelayan pesisir Malang Selatan rendah. Ini dapat dilihat pada kenyataan, bahwa 40 % responden nelayan pemilik kapal dan 50 % ABK hanya berpendidikan tamat SD. Selain itu terdapat pula 12 % pemilik kapal dan 5,6 % ABK tidak pernah sekolah, serta terdapat lagi 16 % pemilik kapal dan 14,4 % ABK yang tidak tamat SD. (3) munculnya fenomena "budaya" negatif pola hidup boros, berfoya-foya, perjudian dan minuman keras, khususnya pada saat musim panen ikan lebih memperberat penderitaan nelayan ABK pada musim paceklik. Oleh karena itu tidak mengejutkan apabila pada musim paceklik di kawasan nelayan sering terjadi kerawanan sosial. (4) kesenjangan ekonomi dan sosial antara nelayan pemilik kapal dengan nelayan ABK. Hal ini bisa ditandai dengan perbedaan tingkat kepemilikan, rumah, tanah, kendaraan, barang elektronik, serta tingkat pengeluaran keluarga. (5) dalam hal kepemilikan tanah di pemukiman nelayan Pujiharjo, nelayan hanya memegang semacam surat keterangan hak pakai yang dikeluarkan oleh Camat Tirtoyudo. Sedangkan di pemukiman nelayan Sendangbiru (Tambakrejo) nelayan justru memegang formulir (yang di dalamnya sudah tercantum nama-nama penghuni) surat pernyataan kesanggupan membeli kapling yang ditempati kepada pihak swasta, yaitu PT Arum Permai Barat. (6) ketergantungan nelayan pemilik kapal pada pekerjaan nelayan lebih

tinggi dibanding ABK. Ini ditunjukkan oleh fakta, bahwa seluruh responden nelayan pemilik tidak ada niatan untuk suatu saat meninggalkan pekerjaan nelayan. Sementara di kalangan ABK terdapat 48,9 % responden yang menyatakan memiliki niat untuk suatu saat meninggalkan pekerjaan nelayan. (7) sebagian nelayan pemilik kapal dan sebagian nelayan ABK memiliki pekerjaan lain di luar pekerjaan pokoknya sebagai nelayan. Dengan memiliki pekerjaan lain tersebut, tingkat kehidupan mereka menjadi lebih baik dibanding nelayan-nelayan lain. (8) khusus di kalangan responden nelayan ABK terdapat sebagian ABK yang sebenarnya memiliki keterampilan, tetapi karena kendala-kendala tertentu keterampilan itu tidak dapat dimanfaatkan sebagai usaha atau pekerjaan sampingan. (9) sebagian terbesar responden (lebih 70 %) nelayan pemilik kapal maupun ABK tidak memahami otonomi daerah, konsekwensi dan implikasinya terhadap kawasan yang menjadi tempat sekaligus sumber penghidupan mereka. Nelayan tidak banyak tahu tentang perkembangan maupun informasi yang berkaitan dengan lingkungan sekitarnya.

Daftar Pustaka

- CIC Indocommercial, 2000, *Nelayan Kecil Akan Dilindungi Dengan Sistem Kuota*, Jakarta
- Civitas, Edisi 36, Tahun 2001
- Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang, 2001, *Data-data Sumberdaya Manusia dan Perikanan*, tidak diterbitkan
- Kusumastanto Tridoyo, Ramli Muhammad, *Kebijakan Setengah Hati Serta Kemakmuran Semu di Pesisir dan Lautan*, http://www.pesisir.or.id/warta/kebijakan_setengah_hati.html
- Husni, Syarif, dan Tajidan, 1999, *Studi Sosial Ekonomi Rumah Tangga Nelayan Tradisional di Desa Tertinggal Kecamatan Sekotong Tengah Lombok Barat*, dalam Jurnal Penelitian Universitas Mataram, Edisi B : IPS dan Humaniora, Volume : 1, No. 21, Oktober
- Sarwono Kusumaatmodjo, 2000, *Potensi Sumberdaya Perikanan ZEE Belum Banyak Dimanfaatkan*, Jakarta, Capricorn Indonesia Consult Inc.
- _____, *Krisis Sumberdaya Sekitar Pantai*, Down to Earth
 Nr. 45, Mei 2000, <http://www.gn.apc.org/dte/45iCR.htm>
- Surabaya Post, 27 Mei, 2001
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang *Pemerintahan Daerah*